BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Adapun menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa:

> "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)".

Sementara menurut Abdul Halim (2007:43) sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai berikut:

> "Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan".

Sedangkan Menurut Deddi Nordiawan (2010:201) dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa:

> "Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

Dari Pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah Proses akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara manual atau menggunakan komputer.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise (2008:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1) Pertanggungjawaban
   Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2) Manajerial
   Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3) Pengawasan
   Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

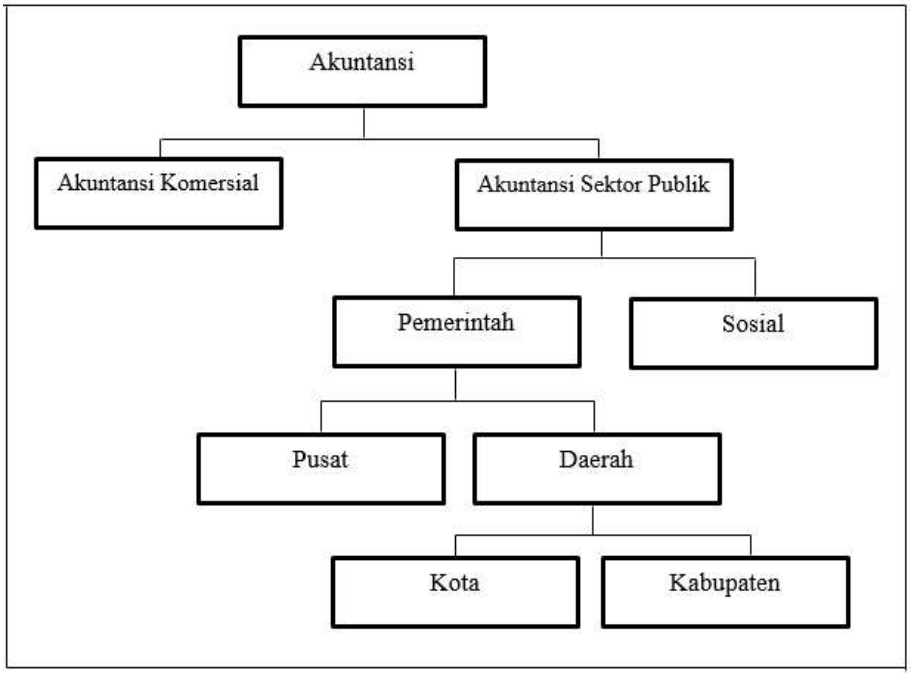
2.1.1.3 Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

Erlina Rasdianto (2013:2) mengatakan secara umum akuntansi dibedakan atas akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Menurut Erlina Rasdianto (2013:2) mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari 2 bidang utama, yaitu:

1) Akuntansi Komersial Perusahaan
   Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, penanaman modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan penetapan pajak. Akuntansi komersial perusahaan adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada entitas bisnis (perusahaan) yang mencari keuntungan atau laba.
2) Akuntansi Sektor Publik
   Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintahan. Akuntansi sektor publik dibagi atas :
   a) Akuntansi Pemerintah
      Akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Akuntansi pemerintah dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah daerah terdiri dari akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintahan daerah agar dapat digunakan secara seragam diseluruh pemerintah daerah.
   b) Akuntansi Sosial
      Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro yang melayani perekonomian nasional. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Akuntansi ini banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti partai politik, masjid, puskesmas, rumah sakit, sekolah atau universitas, lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi di atas, kedudukan akuntansi keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina Rasdianto (2013:4)

Gambar 2.1
Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.4 Sistem Pencatatan

Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1) S*ingle entry*
2) *Double entry*
3) *Triple entry*

Adapun penjelasan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

1) *Single Entry*
   Sistem pencatatan *single entry* disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transasksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. *Single entry* ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem *double entry* atau *triple entry*.
2) *Double Entry*
   Sistem pencatatan *double entry* disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem d*ouble entry* sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (*single entry*). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan d*ouble entry.*
3) *Triple Entry*
   Sistem pencatatan *triple entry* adalah sistem pencatatan yang menggunakan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada *double entry*. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem *triple entry* ini dilaksanakan saat pencatatan *double entry* dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.1.5 Basis Akuntansi Pemerintahan

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengemukakan bahwa:

> "Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan".

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina Rasdianto (2013:10) terdiri dari tiga basis yaitu:

1) Akuntansi berbasis kas
2) Akuntansi berbasis akrual
3) Akuntansi kas menuju akrual

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1) Akuntansi berbasis kas
   Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.
2) Akuntansi berbasis akrual
   Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.

3) Akuntansi berbasis kas menuju akrual
   Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.1.6 Siklus Akuntansi

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan akuntansi adalah suatu sistem, suatu sistem mengelola *input* (masukan) dan menjadi *output* (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outpunya adalah laporan keuangan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengemukakan bahwa:

> "Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi".

Sementara menurut Nurlan Darise (2008:41) mengemukakan bahwa:

> "Untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami siklus akuntansi".

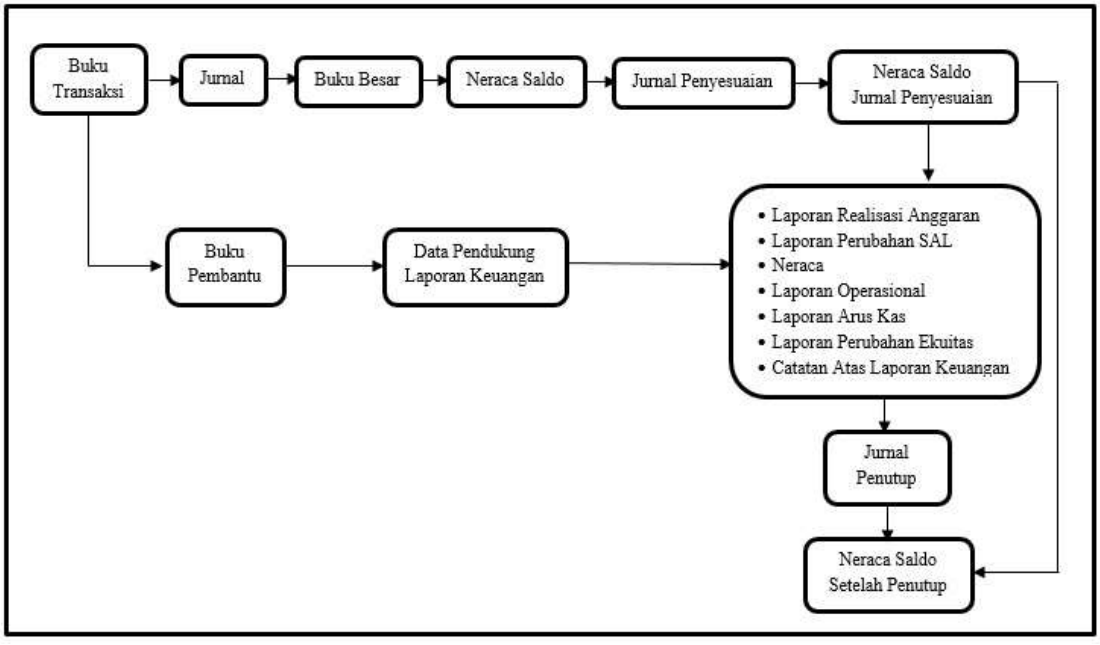
Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahap-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan.

Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sebagai berikut:

1) Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2) Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal.
3) Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar.
4) Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindah-kan saldo-saldo buku besar neraca saldo.
5) Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling up to date.
6) Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan.
7) Menyusun laporan keuangan.
8) Menutup buku besar.
9) Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Tahapan siklus akuntansi pemerintah daerah dapat digambarkan seperti Gambar 2.2 berikut ini:

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah



Sumber: Erlina Rasdianto (2013:7)

Gambar 2.2
Siklus Akuntansi keuangan Daerah

2.1.1.7 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Deddi Nordiawan (2010:201), Bastian (2010:319), dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1) Pencatatan
2) Pengikhtisaran
3) Pelaporan

Adapun penjelasan sistem akuntansi keuangan sebagai berikut:

1) Pencatatan
   a) Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.
   b) Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal.
   c) Memindahbukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.
2) Pengikhtisaran
   a) Penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi yaitu suatu daftar yang memuat nama akun atau rekening beserta jumlah saldonya selama periode tertentu, diambil dari buku besar.
   b) Pembuatan ayat jurnal penyesuaian yaitu menyesuaikan akun-akun pada akhir periode yang belum menyajikan informasi yang paling up to date.
   c) Penyusunan kertas kerja atau neraca lajur yaitu neraca lajur merupakan alat pembantu penyusunan laporan keuangan.
   d) Pembuatan ayat jurnal penutup yaitu prosedur jurnal penutup diposting ke akun-akun bersangkutan sehingga setelah diposting, akun nominal akan nol.
   e) Pembuatan neraca saldo setelah penutupan yaitu neraca yang berisi daftar akun riil yang dibuat yang dibuat setelah dilakukan penutupan.
   f) Pembuatan ayat jurnal pembalik yaitu apabila diperlukan setelah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dibuat ayat jurnal pembalik.
3) Pelaporan
   Setelah proses selesai, maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintahan

2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun pengertian standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Tanjung (2012) dalam Vicky Agustiawan (2013) mengemukakan bahwa:

> "Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD".

Menurut Indra Bastian (2010:138) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

> "Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.1.2.2 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun tujuan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:138) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah:

"Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah".

Sedangkan menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa:

> "Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan".

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan standar akuntansi pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah.

2.1.2.3 Kedudukan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Adapun kedudukan standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Indra Bastian (2010:139) sebagai berikut:

1) Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2) Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada penerapannya, muncul kebutuhan akan upaya pengharmonisasian berbagai peraturan baik di Pemerintah pusat maupun di Pemerintah daerah dengan SAP.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, setiap pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah.

2.1.2.4 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan

Adapun ruang lingkup standar akuntansi pemerintahan yang dinyatakan oleh Deddi Nordiawan (2007:123) mengemukakan bahwa:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah".

Sementara menurut Indra Bastian (2010:139), ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

> "SAP ditetapkan di lingkup pemerintah, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan".

Dapat dikatakan bahwa ruang lingkup dari standar akuntansi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan daerah serta organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

2.1.2.5 Indikator Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Indra Bastian (2010:140) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan, penyajian laporan keuangan terdiri sebagai berikut:

1) Basis akrual

2) Komponen laporan keuangan

3) Periode pelaporan

Adapun penjelasan indikator standar akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1) Basis akrual.
   Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
2) Komponen laporan keuangan.
   Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:
   1. Laporan Realisasi Anggaran.
   2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
   3. Neraca.
   4. Laporan Operasional.
   5. Laporan Arus Kas.
   6. Laporan Perubahan Ekuitas.
   7. Catatan atas Laporan Keuangan.
3) Periode Pelaporan
   Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:
   1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
   2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Adapun pengertian kualitas dan laporan keuangan yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam Susilawati (2014) mengemukakan bahwa:

> "Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan".

Pengertian laporan keuangan yang dikemukakan oleh Indra Bastian (2010:9) sebagai berikut:

> "Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan".

Sementara menurut Mahmudi (2011:143) mengemukakan bahwa:

> "Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan".

Sedangkan menurut Erlina Rasdianto (2013:21) mengemukakan bahwa:

> "Laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya".

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang terstruktur dalam suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.

2.1.3.1 Tujuan Laporan Keuangan

Adapun tujuan laporan keuangan secara umum dan khusus yang dikemukakan Erlina Rasdianto (2013:21) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermamfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya".

Sedangkan tujuan laporan keuangan secara khusus sebagai berikut:

> "Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah secara khusus adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya kepadanya".

Berdasarkan tujuan yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk mengambil keputusan.

2.1.3.2 Indikator Laporan Keuangan

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa:

> "Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya".

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

1) Relevan
2) Andal
3) Dapat dibandingkan
4) Dapat dipahami

Adapun penjelasan indikator laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1) Relevan.
   Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan, yaitu:
   a) Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value).*
      Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
   b) Memiliki manfaat prediktif *(predictive value).*
      Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   c) Tepat waktu.
      Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
   d) Lengkap.
      Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2) Andal.
   Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik, yaitu:
   a) Penyajian jujur.
      Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
   b) Dapat diverifikasi *(verifiability).*

Informasi disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas.
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tetentu.

3) Dapat dibandingkan.
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4) Dapat dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.2 Kerangka Pemikiran

Laporan keuangan Pemerintah, disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah (Bastian, 2010:336). Pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya standar dan sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu (Anwar Nasution, 2009).

Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan dkk, 2010:201). Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diharapkan akan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota, sehingga pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan tuntutan masyarakat (Ifa Ratifah, 2012). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah (Ifa Ratifah, 2012).

Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2011:271). Penerapan standar akuntansi pemerintahan diyakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Deddi Nordiawan, 2009:25). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138). Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2010:138).

Penerapan SAP mewajibkan setiap entitas pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan

serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang *useful* (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013). Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP (Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo, 2013).

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Adapun pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2004:35) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal".

Menurut Bastian (2007:4) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya

> merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan".

Sementara menurut Mahmudi (2010:27) mengemukakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Sistem akuntansi pemerintah daerah yang disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah pada salah satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas".

Sedangkan menurut Agus Mulyanto (2009) dalam As Syifa Nurillah dan Dul Muid (2014) mengemukakan bahwa sistem akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan atau ada satu bagian sistem yang tidak diterapkan maka sulit untuk memperoleh karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP yakni relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan".

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi keuangan Daerah yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

2.2.2 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Adapun pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:138) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan keualitas laporan keuangan pemerintah".

Menurut Mahmudi (2011:271) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan".

Sementara menurut Deddi Nordiawan (2009:25) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di yakini berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah".

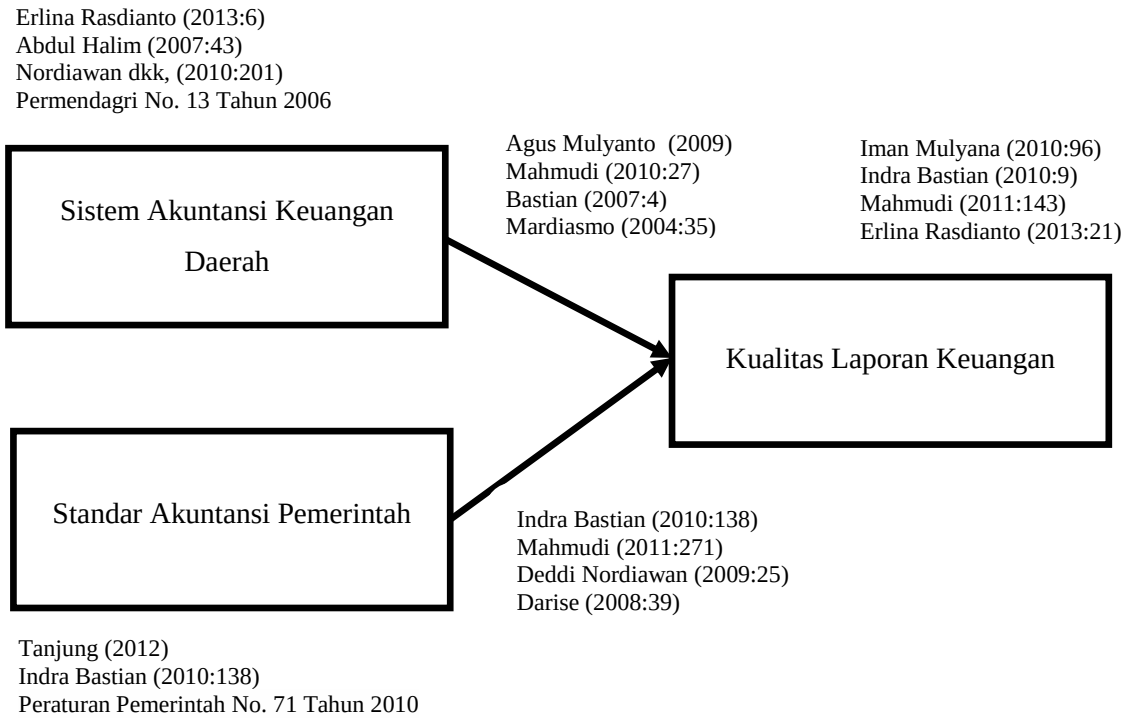
Sedangkan Menurut Nurlan Darise (2008:39) mengemukakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

> "Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan".

Berdasarkan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang baik akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

Paradigma Penelitian



Gambar 2.3
Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ke tiga dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Landasan Teori dan Kerangka

Pemikiran. Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang diberikan penulis. Untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

H_2: Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.